

**INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)
DAN PENANGGULANGAN KRISIS MONETER
DI INDONESIA**

Irma Indrayani¹

Abstract

Studies on international economy has become interesting given the anomaly of different economies and economic crises across the globe especially Asia in the last decade. The paper discusses the nature of services provided by worldwide economic monetary institution, IMF, whose role in the world affairs has been crucial. Description of the organization is made along with some comments on their critical issues of its mechanisms. Relevant theoretical perspectives are used in the account. The paper comes to some suggestions that includes the necessity for IMF to take more effective measures in order for some economies to be able to escape from their respective economic crises.

Keywords : international monetary fund (IMF), Asia, economic crises.

PENDAHULUAN

Kajian sejarah ekonomi internasional menjadi menarik ditinjau kembali karena kita dihadapkan pada masalah yang sama sampai saat ini, yakni bantuan asing. Bagaimana bantuan asing menjadi sangat dilematis mempengaruhi hampir seluruh nadi kehidupan masyarakat. Berikut adalah potret akademis tentang penanggulangan krisis moneter di Indonesia.

Sebuah sistem moneter internasional atau lebih dikenal dengan istilah tata atau rezim moneter internasional, merujuk pengertian rezim yang dikemukakan oleh Stephen Krasner adalah peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, instrumen penunjang, fasilitas pelengkap, prosedur dan organisasi yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran internasional.

Sementara itu, sistem moneter adalah suatu sistem yang mengatur tata moneter yang dapat diklasifikasikan menurut cara penentuan kurs atau

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta

menurut bentuk aset cadangan internasional yang ada. Berdasarkan klasifikasi kurs terdapat sistem kurs baku, sistem patokan kurs baku merayap (*crawling peg system*), sistem kurs mengambang terkendali dan sistem kurs mengambang bebas. Apabila ditinjau menurut klasifikasi jenis-jenis aset internasional yang digunakan, masyarakat ekonomi internasional telah memiliki sistem standar emas, standar uang buatan murni (seperti standar tukar dollar yang tidak dikaitkan dengan emas), standar tukar emas (kombinasi antara keduanya).

Dalam sebuah sistem moneter internasional yang baik, terdapat suatu aturan-aturan yang mampu memaksimalkan arus perdagangan dunia, peningkatan investasi internasional, dan interdependensi global serta mampu pula menciptakan suatu pola distribusi "keuntungan" perdagangan yang relatif merata di kalangan semua pihak atau negara yang terlibat didalamnya. Kualitas sebuah sistem moneter internasional dapat dievaluasi berdasarkan tiga kriteria pokok, yaitu:

Pertama, kriteria penyesuaian (*adjustment*), merujuk pada fasilitas, prosedur, proses atau kemudahan mekanisme koreksi atas setiap ketidakseimbangan neraca pembayaran yang terkandung dalam masing-masing sistem. Sebuah sistem moneter internasional yang baik juga harus mampu menciptakan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyesuaian tersebut.

Kedua, kriteria likuiditas (*liquidity*) mengacu pada sejumlah aset cadangan internasional yang tersedia guna mengatasi berbagai ketidakseimbangan temporer pada neraca pembayaran. Berdasarkan pada kriteria seperti ini, sebuah sistem moneter internasional yang baik adalah suatu sistem yang mampu memanfaatkan secara leluasa dalam rangka mengoreksi defisit atau surplus neraca pembayaran tanpa mengganggu beroperasinya perekonomian domestik yang dapat menimbulkan tekanan-tekanan inflasioner terhadap negara-negara lain secara keseluruhan.

Ketiga, kriteria kepercayaan (*confidence*). Kriteria ini merujuk pada sejauh mana masyarakat internasional memiliki pengetahuan dan menaruh kepercayaan atas mekanisme penyesuaian dan ketersediaan cadangan internasional dalam mengatasi berbagai masalah pembayaran internasional, yang ada pada sebuah sistem. Atas dasar kriteria ini, sebuah sistem moneter internasional dikatakan baik apabila masyarakat dunia memberikan kepercayaan yang memadai terhadapnya.

Agar sistem tersebut memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi suatu negara, maka negara itu biasanya berusaha agar sistem moneter nasionalnya dapat terefleksi dalam sistem moneter internasional yang mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik dari negara-negara besar. Dalam kondisi seperti ini, sistem moneter internasional dapat menjadi arena persaingan antar negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Fenomena ini menjelaskan bahwa keberadaan sistem moneter internasional tidak bisa dipisahkan dari politik internasional. Sistem moneter internasional selalu terkait dengan orde politik yang sedang berjalan dalam hubungan internasional. Negara yang memiliki kekuatan dominan dalam politik internasional selalu berusaha mempengaruhi karakteristik dan aturan-aturan dalam rezim moneter internasional. Di sisi lain, stabilitas sistem moneter internasional itu akan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi dan politik negara hegemon.

Pembentukan IMF Secara Historis

Pada bulan Juli tahun 1944, wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris dan 44 negara lainnya bertemu di sebuah kota kecil bernama Bretton Woods di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat untuk merundingkan pembentukan sistem moneter internasional dan merumuskan sistem seperti apa yang harus diciptakan setelah perang berakhir. Pertemuan ini juga dilatarbelakangi oleh kenangan yang buruk atas kacaunya situasi ekonomi dunia sebelum perang dunia berlangsung. Tujuannya adalah menciptakan suatu sistem moneter internasional yang benar-benar mampu menjamin terciptanya kondisi *full employment* dan stabilitas harga sekaligus membuka peluang untuk semua negara mencapai keseimbangan eksternal tanpa memberlakukan pembatasan perdagangan.

Salah satu keputusan penting yang dicapai pada pertemuan itu adalah terbentuknya sebuah lembaga baru yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau lebih dikenal dengan *World Bank* (Bank Dunia). IMF difokuskan pada performa makro ekonomi dan kebijakan sektor finansial, sementara Bank Dunia lebih fokus pada pembangunan jangka panjang dan pengurangan tingkat kemiskinan.

IMF didirikan dengan dua fungsi pokok, pertama, memantau kepatuhan negara-negara anggota dalam melaksanakan serangkaian peraturan

dan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan perdagangan dan keuangan internasional yang telah disepakati bersama. Kedua, menyajikan fasilitas kredit atau dana pinjaman bagi negara-negara yang mengalami kesulitan temporer pada neraca pembayarannya. Dengan kata lain, IMF didirikan untuk memantau dan menjaga beroperasinya sistem moneter internasional yang diciptakan seusai Perang Dunia dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyedia kredit bagi negara-negara yang tengah menghadapi kesulitan jangka pendek pada neraca pembayaran mereka.

IMF mulai membuka pintu keanggotaan mulai 1 Maret 1947. Sebanyak 30 negara langsung mendaftar sebagai anggota penuh, termasuk pula negara-negara pecahan Uni Sovyet dan negara-negara lainnya yang menjadi anggota Blok Komunis pada awal 1990-an. Awal tahun 1994, keanggotaan IMF mencapai 178 negara.

Pada mulanya, salah satu unsur pokok manajemen moneter dalam IMF adalah keharusan bagi semua negara untuk membakukan kursnya terhadap dollar, sedangkan dollar sendiri harus dibakukan nilai tukarnya terhadap emas. Dengan demikian keunggulan sistem kurs baku ini terletak pada kemampuannya memaksakan disiplin moneter kepada semua negara. Persepsi ini didasarkan oleh pemikiran bahwa sistem kurs mengambang merupakan biang keladi atas merajalelanya praktek spekulasi yang merusak stabilitas moneter sekaligus merugikan hubungan-hubungan perdagangan internasional.

Pasal-pasal perjanjian IMF juga masih memberi kelonggaran pada anggota, antara lain pertama, fasilitas kredit/pinjaman IMF. IMF senantiasa siap untuk memberikan pinjaman valuta asing kepada negara anggotanya yang tengah dililit kesulitan berupa defisit transaksi berjalan yang parah dan tidak dapat diatasi dengan kebijakan fiskal atau moneter. Hal ini dapat terjadi mengingat dampak negatif kebijakan-kebijakan ini terhadap kondisi *employment* domestik. Sementara dana pinjaman IMF dihimpun dari iuran wajib semua anggota berupa emas dan berbagai macam valuta asing.

Kedua adalah paritas penyesuaian. Meskipun kurs setiap negara tetap baku, dalam kondisi tertentu kurs boleh diubah; artinya, mata uang tersebut boleh didevaluasi atau direvaluasikan terhadap dollar asalkan IMF sependapat bahwa neraca pembayaran dari negara yang bersangkutan memang mengalami "ketidakseimbangan fundamental". Istilah mengenai hal ini tidak dirinci dalam pasal-pasal perjanjian IMF, namun klausul ini jelas

ditujukan bagi negara-negara yang tengah mengalami krisis transaksi berjalan secara permanen.

Perjanjian IMF juga mendorong para anggotanya untuk menjadikan mata uang mereka konvertibel. Kondisi ini mutlak diperlukan dalam rangka mempromosikan perdagangan multilateral yang efisien. Pasal-pasal IMF hanya membenarkan konvertibilitas bagi neraca transaksi berjalan saja. Selain itu, semua negara masih dibenarkan menerapkan pembatasan atas transaksi neraca modal, asalkan mereka memungkinkan digunakannya mata uang mereka untuk berbagai transaksi yang masuk ke dalam neraca transaksi berjalan.

Peran utama yang dijalankan oleh IMF adalah posisi sebagai rujukan para investor dalam menganalisis keadaan suatu negara untuk berinvestasi. Kredibilitas suatu negara "ditentukan" oleh penilaian IMF yang juga menjadi patokan dasar bagi dukungan lain dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan utamanya adalah para pemerintahan dari negara-negara anggota IMF yang bertindak sebagai kreditor dalam memutuskan apakah suatu negara berhak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana.

Jika suatu negara tidak mendapatkan tanda layak kredit, maka negara tersebut akan sulit mendapatkan bantuan/pinjaman dana, baik dari lembaga-lembaga multilateral maupun negara-negara kreditor yang dapat dilakukan secara bilateral. Situasi ini dapat kita lihat pada pengalaman Indonesia di bawah pengawasan IMF. Penilaian IMF sangat ketat terhadap pelaksanaan program-program penyesuaian yang tertuang dalam LoI RI-IMF. Jika pemerintah tidak melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam Nota Kesepakatan, maka IMF akan menunda pencairan bantuan pinjaman dana yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi. Lebih jauh lagi, penundaan ini diartikan sebagai sinyal negatif bagi negara-negara kreditor. Pada akhirnya, situasi seperti ini membuat Indonesia sulit mendapatkan kepercayaan internasional untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang kondusif dalam berinvestasi.

Misi/Tujuan Pembentukan IMF

Belajar dari fenomena *Great Depression 1929 - 1939* tampak bahwa krisis neraca pembayaran dan hancurnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat memicu negara-negara untuk menerapkan

kebijakan proteksionisme yang dilakukan dengan cara membatasi partisipasi di dalam perdagangan internasional dengan tujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing. Untuk menghindari terulangnya proteksionisme dalam transaksi antar negara, IMF dalam kaitan dengan perannya sebagai rezim moneter internasional diberi otoritas oleh para anggotanya untuk memimpin upaya *rescue plan* (rencana penyelamatan). Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan secepat mungkin guna menciptakan stabilitas moneter dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Statuta IMF.

Sistem yang dirumuskan di Bretton Woods tersebut merupakan embrio bagi sistem moneter internasional yang berlangsung selama beberapa dekade sesudahnya. Lembaga keuangan internasional ini menjalankan dua fungsi pokok yaitu pertama, memantau kepatuhan negara-negara anggota dalam melaksanakan serangkaian peraturan dan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan perdagangan dan keuangan internasional yang telah disepakati bersama. Kedua, menyajikan fasilitas kredit atau dana pinjaman bagi negara-negara yang mengalami kesulitan temporer pada neraca pembayarannya.

Penarikan pinjaman dari IMF dibatasi dan hanya dibenarkan untuk membiayai defisit temporer neraca pembayaran. Pinjaman ini harus dibayar kembali dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun agar tidak mengganggu sumber daya IMF dalam mengadakan pinjaman-pinjaman jangka panjang untuk keperluan lain. Bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan pinjaman dana pembangunan jangka panjang, negara-negara tersebut dapat mengusahkannya dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) atau lebih dikenal dengan World Bank (Bank Dunia), atau dari lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya seperti Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) yang dibentuk pada tahun 1960 dengan tujuan menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersubsidi bagi negara-negara berkembang yang relatif miskin. Sumber lain juga dapat diperoleh dari Korporasi Keuangan Internasional (IFC) yang dibentuk pada tahun 1956 untuk memacu dan membantu penyelenggaraan investasi swasta di negara-negara berkembang baik itu melalui sumber dana internal maupun dari luar negeri.

IMF juga diberi wewenang untuk mengumpulkan atau mengolah data-data mengenai neraca pembayaran dari segenap negara anggotanya, termasuk memantau kelangsungan perdagangan internasional serta menghimpun data-

data ekonomi penting lainnya dari berbagai rujukan seperti *International Financial Statistics* dan *Direction of Trade Statistics*. Terbitan-terbitan semacam ini merupakan sumber rujukan yang paling lengkap dan dapat diandalkan dalam melihat data-data neraca perdagangan serta berbagai indikator ekonomi penting lainnya dari negara anggota IMF.

Begitu dinyatakan resmi bergabung dengan IMF, sebuah negara diwajibkan membayar 25 persen dari nilai total kuotanya dalam bentuk emas kepada IMF sedangkan sisanya dalam bentuk mata uangnya sendiri. Pada saat negara tersebut membutuhkan pinjaman dari IMF, IMF memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang konvertibel yang kursnya disahkan oleh IMF. Seandainya dana yang dibutuhkan lebih besar dari simpanan atau kuotanya di IMF, lembaga ini menyediakan pinjaman yang nilainya maksimal 200 persen dari nilai kuota negara tersebut dalam satuan nilai mata uang nasionalnya.

Setiap negara anggota berdasarkan ketentuan IMF, dapat meminjam dana maksimal 20 persen dari nilai kuotanya untuk setiap tahun, dan total 125 persen untuk kurun waktu lima tahun. Negara itu juga dapat menarik 25 persen pertama dari kuotanya atau dapat disebut sebagai ambang emas, tanpa kesulitan apa pun. Negara tersebut bahkan tidak diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, proses pencairan dana tersebut sangatlah mudah. Namun, untuk memperoleh pinjaman tambahan pada tahun-tahun berikutnya atau disebut ambang kredit, IMF akan memberlakukan prosedur yang lebih ketat dan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan, semakin tinggi dana yang ditarik maka akan semakin tinggi pula bunganya.

Jadwal pembayaran kembali biasanya harus dilakukan dalam waktu tiga hingga lima tahun yang dilakukan dengan cara pembelian kembali oleh negara itu atas mata uangnya di IMF. Adapun alat pembayaran untuk menebus kembali mata uang nasional negara peminjam itu adalah valuta asing yang konvertibel yang ditetapkan oleh IMF. Pembayaran ini harus terus dilakukan sampai IMF kembali menyimpan sekitar 75 persen kuota negara tersebut dalam mata uang domestik, dimana sisanya adalah emas atau valuta asing konvertibel. IMF juga memungkinkan pembayaran dilakukan dalam jumlah valuta asing tertentu yang jumlah persediaan dalam kas IMF tidak mencapai 75 persen.

Jika cadangan IMF atas suatu mata uang sudah mencukupi syarat 75

persen nilai kuotanya, maka negara tersebut dapat meminjam sisanya tanpa harus membayarnya dengan mata uangnya sendiri. Fasilitas ini disebut sebagai ambang emas istimewa. Akan tetapi, jika IMF kehabisan satu jenis mata uang sedangkan negara pemiliknya tidak kunjung melunasi pinjamannya, maka IMF dapat menyatakan bahwa mata uang tersebut "langka" dan mengizinkan negara-negara anggota melakukan diskriminasi perdagangan terhadap pemilik mata uang negara langka tersebut. Situasi ini didasarkan alasan pandangan IMF yang menganggap proses penyesuaian terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran sebagai suatu tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh negara yang mengalami defisit maupun surplus pembayaran. Sampai saat ini IMF belum pernah menyatakan suatu mata uang sebagai mata uang langka sehingga ketentuan yang membiarkan negara-negara melakukan diskriminasi perdagangan secara sah tersebut belum pernah diterapkan.

Landasan/Strategi Kebijakan IMF

Dalam menjalankan peran sebagai rezim moneter internasional, IMF menerapkan beberapa kriteria penilaian terhadap suatu negara yang telah menandatangani Nota Kesepakatan. Pertama, *performance criteria*, yaitu suatu periode untuk mencapai target yang harus dilaksanakan oleh suatu negara sehubungan dengan upaya untuk memperoleh pinjaman dana. Kegagalan dalam pelaksanaan kriteria ini, dapat menyebabkan pinjaman dana tertunda. Penilaian dilakukan pada pengawasan kebijakan pemerintah di sektor publik maupun restrukturisasi aturan di bidang perdagangan.

Kedua, *structural benchmark*. Kriteria ini berupa pengawasan tindakan-tindakan tambahan yang disyaratkan oleh IMF dalam pelaksanaan program penyesuaian. Jika terdapat masalah dalam kaitannya dengan *performance criteria*, persetujuan pencairan dana dapat tertunda sebagai hasil dari sidang Dewan Gubemur IMF.

Ketiga, *prior action*, berupa tindakan yang dilakukan negara dimana harus mengindikasikan keseriusan dalam pelaksanaan program ekonomi IMF. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program IMF.

Merujuk pada teori stabilitas hegemon dari Kindleberger, sebuah sistem ekonomi dunia yang stabil membutuhkan suatu kepemimpinan tunggal yang bersedia menjalankan peranan stabilizer. Sang pemimpin (negara

hegemon) harus mampu menyediakan pasar bagi produk-produk negara lain yang sulit dipasarkan, menyediakan modal - dalam kapasitas sebagai donor - bagi negara-negara lain, dan berperan sebagai negara pemberi pinjaman bila terjadi krisis finansial serta menjaga struktur nilai tukar yang stabil sekaligus mengkoordinasikan kebijakan makro ekonomi.

Kondisi stabilitas hegemonis dalam sistem ekonomi internasional mensyaratkan berlakunya prinsip-prinsip pasar bebas atau ekonomi pasar oleh seluruh negara dalam sistem. Hal ini dilakukan dengan pemikiran sebagai negara hegemon - mengingat kekuatan yang dimilikinya-bertugas untuk terus memantapkan dan memelihara norma-norma atau aturan dari sistem ekonomi pasar. Di lain pihak, negara-negara anggota sistem hanya akan mendapat perlindungan dari sang hegemon apabila negara-negara itu konsisten menjalankan prinsip-prinsip liberalisme ekonomi.

Dalam kaitannya dengan asas liberalisme adalah pemberantasan isu KKN untuk mewujudkan persaingan yang sehat diantara individu di masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pasar, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar dan memperbaiki sistem finansial.

Kebijakan Penyesuaian Struktural

Kebijakan IMF dalam kaitannya sebagai rezim moneter internasional ini pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, pertama, jangka pendek. Program jangka pendek diterapkan pada saat IMF membantu mengatasi krisis moneter suatu negara yang meminta bantuan pinjaman dana. IMF mewajibkan negara tersebut untuk menandatangani Nota Kesepakatan yang merangkum kesediaan negara penerima bantuan untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi sesuai yang disarankan oleh IMF. Fungsi dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dokumen yang merangkum agenda perubahan kebijakan ekonomi negara penerima bantuan yang juga dibuat oleh negara bersangkutan atas "petunjuk" IMF. Namun IMF dapat menggunakan Nota Kesepakatan ini sebagai dasar untuk menilai apakah sebuah negara cukup serius atau tidak dalam melakukan perubahan kebijakan ekonomi. Pejabat IMF seringkali menggunakan Nota ini untuk memutuskan pencairan dana pinjaman atau menunda paket bantuan pinjaman keuangan kepada suatu negara atau bahkan membatalkannya.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh IMF terangkum dalam

persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan istilah *Structural Adjustment Package* (SAP's) atau Paket Penyesuaian Struktural meliputi pertama, membenahan struktur ekonomi makro, yaitu menciptakan stabilitas struktur ekonomi makro melalui upaya perbaikan disektor industri dalam negeri seperti meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran, meningkatkan efisiensi, menaikkan produktivitas dan lain-lain. Selain itu juga menghilangkan berbagai distorsi struktural seperti membenahan lembaga perbankan, meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pengawasan dan hal lainnya. Pada prakteknya, kebijakan ini dapat pula mencakup berbagai upaya seperti rasionalisasi perusahaan, likuidasi, akuisisi oleh perusahaan asing sampai pada penciptaan stabilitas politik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam berbagai aktivitas bisnis.

Kedua, liberalisasi dan optimalisasi mekanisme pasar. IMF dalam hal ini berupaya untuk memperbaiki kinerja mekanisme pasar dalam sistem perekonomian suatu negara yang dilakukannya rangka memulihkan pertumbuhan ekonomi yang meliputi berbagai strategi kebijakan antara lain mendorong sektor swasta *vis a vis* sektor publik, memperbaiki sistem insentif bagi perusahaan-perusahaan negara, meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan negara dan memobilisasi sektorsektor domestik, terutama sektor yang dapat dengan cepat diperjual belikan di tingkat nasional maupun internasional. Menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan) secara progresif. Meningkatkan iklim deregulasi. Dalam kaitan ini hambatan atau restriksi untuk masuk pasar (*barriers to entry*) harus dihilangkan supaya pasar menjadi kompetitif.

Ketiga, membenahan kebijakan moneter, yaitu menetapkan kebijakan moneter - terutama yang menyangkut penetapan nilai tukar mata uang - secara rasional. Fokus perhatian diarahkan pada aset domestik yang dikuasai oleh sektor perbankan swasta maupun publik dan pihak-pihak lain yang menentukan dana cadangan nasional. Jenis kebijakan ini meliputi tiga aspek utama yaitu penetapan suku bunga bank yang tinggi secara temporer untuk menciptakan stabilitas pasar mata uang, devaluasi mata uang untuk meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar dunia dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekspor, dan pemberlakuan suku bunga, pungutan pajak, serta pemberian subsidi yang berbeda untuk setiap sektor dengan memberikan keringanan bagi sektor-sektor yang dapat mendatangkan devisa bagi negara.

Keempat, pembenahan sektor fiskal dan finansial yaitu upaya untuk mengurangi defisit anggaran belanja dalam upaya untuk memobilisasi dana dari dalam dan luar negeri dengan tujuan menghidupkan kembali iklim investasi yang telah hancur akibat krisis. Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif, yaitu defisit anggaran tak boleh lebih dari dua persen terhadap Product National Bruto. Selain itu, perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. Pengurangan defisit anggaran ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan pungutan pajak utamanya untuk barang mewah dan pendapatan perusahaan negara melalui kenaikan tarif listrik, air dan telephone. Hal lainnya dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara seperti misalnya penurunan pengeluaran rutin, penghapusan subsidi, dan lain-lain.

Di sektor finansial IMF memfokuskan pemulihan ekonomi melalui tiga cara yaitu membentuk tim khusus untuk menilai lembaga keuangan yang perlu dilikuidasi atau dipertahankan dengan upaya rekapitalisasi seperti BBPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Menyusun paket-paket rehabilitasi bagi lembaga-lembaga yang terkena dampak krisis serta membangun infrastruktur keuangan yang lebih efektif yang meliputi peningkatan supervisi, penetapan plafon kredit dan suku bunga, penyediaan informasi keuangan yang akurat untuk setiap pelaku bisnis, pemberlakuan ancaman dan penghargaan bagi sektor perbankan dan lain-lain.

Berikut ini adalah jawaban Stanley Fisher atas pertanyaan yang diajukan oleh Ekonom Martin Feldsten, agar IMF menimbang lebih dahulu tiga pertanyaan sebelum memutuskan penerapan sebuah program tertentu pada negara yang dilanda krisis ekonomi. Pertama, apakah memang perlu memulihkan akses negara itu ke pasar modal global? Untuk kasus Asia, jawabannya positif. Kedua, apakah masalah teknis tersebut tidak mencampuri kedaulatan negara yang bersangkutan?, sulit untuk menjawabnya. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan mengenai apa yang disebut 'masalah teknis' atau campur tangan tak pantas.

Ketiga, andaikata kebijakan-kebijakan ini dipraktekkan pada negara-negara industri Eropa, apakah IMF juga akan berpikir bahwa hal tersebut pantas dilakukan untuk menanyakan negara-negara yang dibantu IMF? Jawabannya menurut Stanley Fisher, ya.

Pada kenyataannya, peranan IMF dalam menerapkan program penyesuaian krisis yang mengalami masalah ketidakseimbangan ekonomi nasional dengan cara memasukkan langkah-langkah kebijakan ekonomi makro untuk menyelesaikan persoalan ekonomi makro justru menimbulkan polemik. Bagaimanapun, suatu negara yang sudah mengikat diri kepada IMF melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tidak dapat menghindar dari pasal-pasal yang telah ditetapkan.

Kebijakan IMF Jangka Pendek

Pada mulanya, IMF menekankan pada optimalisasi sektor swasta untuk memperkuat kinerja mekanisme pasar dalam strategi pemulihan ekonomi atau dikenal dengan istilah *Orthodox Approach*. Tetapi mendapat kritikan yang muncul di luar ekonom IMF karena fokus yang berlebihan terhadap pelaksanaan mekanisme pasar. Kemudian IMF mulai memberi perhatian pada faktor-faktor lain diluar mekanisme pasar diantaranya: upaya mengurangi laju inflasi melalui pemberlakuan strategi untuk mengekang permintaan, pengontrolan harga, pembenahan struktur politik atau pemulihan demokrasi, pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi pemerintah, penundaan kenaikan gaji pegawai negeri agar tidak membebani anggaran belanja negara. Strategi ini disebut dengan istilah *Heterodox Approach*.

Teori stabilitas hegemonis mensyaratkan bahwa sistem moneter internasional yang stabil hanya bisa diciptakan apabila negara-negara anggota sistem menganut liberalisme ekonomi. Suatu negara hanya akan diperlakukan sebagai anggota sistem yang berhak atas pelayanan dari IMF jika negara itu telah secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip liberalisme ekonomi.

Pada penanganan krisis moneter Indonesia, tahap pertama yang dilakukan oleh IMF dalam membantu menyelesaikan krisis moneter di Indonesia adalah mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi dari sistem ekonomi pasar "terkomando" menuju sistem ekonomi pasar murni.

Dalam pandangan IMF, meskipun Indonesia telah menandatangani Piagam GATT dan menjadi anggota WTO, tetapi Indonesia belum konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar yang tercermin pada pelaksanaan kebijakan perekonomian dalam negeri. Hal ini ditandai dengan banyaknya distorsi dalam kebijakan ekonomi yang masih bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Untuk itulah dalam butir-butir

kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus merupakan transformasi menuju sistem ekonomi pasar yang dikehendaki oleh IMF. Salah satu yang utama adalah kebijakan subsidi BBM ini adalah kebijakan ini jelas mensyaratkan campur tangan pemerintah dalam pengaturan harga jual BBM dalam negeri yang jauh dibawah harga pasar. negeri ini selama tahun 1990-1993. Perekonomian mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan GDP rata-rata mencapai 3,1 persen pertahun antara 1988-1994 dan tingkat inflasi yang dapat ditekan yaitu dari hampir 145 persen menjadi enam persen.

Pada kenyataannya, ternyata modal-modal asing yang masuk ke Meksiko, mayoritas berupa investasi portfolio atau dana-dana temporer. Oleh sebab itulah maka perkembangan perekonomian tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 1994, Meksiko kembali mengalami krisis dengan kondisi yang lebih parah dibandingkan pada era tahun 1980-an. Transaksi neraca berjalan Meksiko mengalami defisit sekitar 30 milyar dollar AS atau setara delapan persen dari jumlah GDP.

Demikian pula halnya dengan Argentina pada tahun 2001. IMF menerapkan strategi yang sama dengan Meksiko untuk mengatasi krisis yang terjadi di Argentina dengan memberlakukan prinsip-prinsip liberalisasi. Implikasinya adalah banyak modal asing masuk ke Argentina. Berdasarkan data dari Bank Dunia, pemerintah Argentina berhasil mengumpulkan dana sekitar 49 milyar dollar AS antara tahun 1991-1999. Modal asing yang masuk ini baik dalam bentuk *foreign direct investment (FDI)*, *loands*, *bonds*, dan investasi portfolio mengalir dalam jumlah besar. Tercatat, *net transfer resources* Argentina pada tahun 1991-1999 mengalami surplus sebesar 53 milyar dollar AS.

GDP Argentina tumbuh 10 persen pada tahun 1992 dan hampir enam persen pada tahun 1993 dan 1994. Setelah resesi tahun 1995 turun menjadi -2,9 persen akibat "Tequila Crisis." Tingkat pertumbuhan kembali positif pada tahun 1998. Defisit fiskal juga berhasil dikurangi dan menjadi dua persen dari GDP. Namun, krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997, berimbas pula pada perekonomian Argentina. NTR yang jumlahnya 18 milyar dolar AS pada 2000 menjadi negatif sebesar 13 milyar dollar AS pada tahun 2001. Perubahan yang sangat drastis ini membuka keadaan perekonomian yang sesungguhnya di Argentina.

Ternyata angka-angka yang tertera dalam *capital inflows* adalah semu

belaka. Modal-modal asing yang masuk ke Argentina ternyata merupakan modal jangka pendek yang mudah kabur ketika ada sentimen negatif sedikit saja. Keadaan ini juga diperparah oleh bukti bahwa masuknya modal asing ke Argentina tidak membuka peluang kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenaikan angka pengangguran dari 15 persen menjadi 17,4 persen pada tahun 2001. Berdasar dari kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minimalitas peran negara dalam perekonomian tidak menjamin tercapainya kinerja ekonomi secara lebih baik . Misalnya pada poin privatisasi. Tujuan privatisasi yang semula diharapkan dapat mengurangi distorsi ekonomi ternyata justru memudahkan munculnya "monopoli" dalam bentuk baru yang lebih pasif. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya usahawan swasta yang berniat menjadi pemilik barn dari sektor usaha yang dijual. Tindakan ini hanya akan memperluas bisnisnya yang telah mapan sehingga dapat berpotensi merusak mekanisme pasar yang semula hendak dituju. Sementara di sisi lain, muncul masalah sosial politik karena menyebabkan ketimpangan aset ekonomi antar elemen masyarakat.

Kebijakan IMF Jangka Panjang

Landasan kebijakan IMF dalam jangka panjang untuk membantu memulihkan perekonomian di negara-negara yang terkena krisis mengacu pada asas perdagangan bebas dan liberalisasi yang terangkum dalam *Washington Consesus* Inti dari *Washington Consensus* adalah aliran pemikiran neo liberal dengan tujuan utama liberalisasi perdagangan dan pasar bebas. Pada penerapannya, aliran neo liberal merupakan pembaruan dari aliran kapitalisme dimana sistem ekonomi dicirikan oleh kepemilikan modal. Landasan kapitalisme atau sistem bisnis yang berorientasi pada pasar (*free enterprise system*) adalah konsep kepemilikan swasta, hak kepemilikan dan pencapaian kemakmuran.

Sampai saat ini, sistem kapitalisme dianggap sebagai sistem yang terbaik untuk menciptakan kemakmuran, perdagangan bebas dan pasar modal yang terbuka dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Situasi ini disebabkan karena tidak adanya alternatif lain (*There is No Alternatives*) selain sistem kapitalisme yang dianggap baik dan memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengatur tata cara moneter dan keuangan maupun perdagangan dunia. Seperti dinyatakan oleh filsuf Skotlandia Adam Smith dalam bukunya *the Nature and Causes of the Wealth*

of Nations pada tahun 1776 mengemukakan bahwa suatu ekonomi pasar menawarkan banyak sekali kebebasan ekonomi untuk menjalankan tujuan yang baik, didukung oleh suatu sistem produksi yang efisien, yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Mekanisme kerja dalam ekonomi pasar berjalan dengan sendirinya, seolah-olah dituntun oleh "tangan ghaib." Dalam kaitan tersebut, dituntut peranan negara yang minimal.

Menyadari kesalahan di masa lalu bahwa perubahan-perubahan ekonomi tidak bisa dijalankan tanpa memperhatikan domain politik, maka RAF melakukan perubahan kebijakan terhadap upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Perubahan ini mengacu pada tantangan ekonomi yang harus dijalankan oleh negara yang hendak mentransformasikan ekonominya.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud disini antara lain promosi asas perdagangan bebas (liberalisasi ekonomi) dan stabilisasi makro ekonomi yang berkelanjutan. Penyelenggaraan privatisasi dengan basis wilayah serta memposisikan pemerintah sebagai penggerak utama perubahan institusi yang mendukung sektor swasta. Berkaitan dengan hal itu, mendorong penguatan sektor finansial, menyiapkan hukum sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan perdagangan bebas serta mengimplementasikan sistem jaminan sosial.

Selain itu juga mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, stabilitas politik dan penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Bagi IMF, pengertian *governance* lebih merujuk pada dukungan atas mekanisme pasar. Fokus perhatiannya lebih diarahkan pada efisiensi ekonomi dengan adanya persaingan bebas antara pelaku ekonomi serta alokasi sumber daya dengan mekanisme harga di sektor swasta. Tujuannya adalah meminta tanggung jawab publik yang lebih luas dari negara atas masalah-masalah sosial.

Merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh IMF selama ini dalam mengatur sistem moneter internasional, terlihat bahwa peranan IMF sudah tidak memadai. Dalam arti, kebijakan yang disarankan oleh IMF dalam upaya mengatasi krisis moneter di suatu negara tidak lagi mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini dimana pertumbuhan ekonomi negara yang dibantu IMF, khususnya Indonesia tidak bertambah baik.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia yang Dibantu IMF

Negara	1994	1995	1996	1997	1998	Kwartal I	1999 Kwartal	Kwartal III
Korea Sel.	8,6	8,9	7,1	5,5	-7,0	4,6	9,8	12,3
Thailand	8,6	8,8	5,5	-0,4	-8,0	0,9	3,5	7,7
Filipina	4,4	4,8	5,7	5,1	-0,6	1,2	3,6	3,1
Indonesia	7,5	8,2	7,8	4,7	-13,2	-7,9	3,3	0,7

Sumber: BPS, *World Economic Outlook IMF*, *The Economist*, Litbang KOMPAS.

Dari keempat negara Asia yang dibantu IMF, Indonesia adalah yang paling terpuruk. Bahkan Thailand sudah tidak memerlukan kehadiran IMF. Sementara itu, Korea Selatan sudah menikmati arus modal masuk investor internasional. Ini dapat dibuktikan dari tingkat pertumbuhan ekonomi keempat negara Asia Tenggara, Indonesia pada kuartal ketiga tahun 1999 hanya sebesar 0,7. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Korea Selatan yaitu sebesar 12,3 persen. Kedua adalah Thailand yaitu sebesar 7,7 persen.

Hal ini dapat dipahami mengingat pada saat terjadinya krisis moneter di negara-negara Asia yang salah satunya disebabkan tidak adanya upaya untuk mengontrol arus lalu lintas modal dunia. IMF tidak mempunyai data akurat mengenai arus modal masuk (investasi) dan arus modal keluar di negara-negara Asia. Meskipun, di lain pihak, krisis tersebut juga tidak lepas dari hilangnya kemampuan negara-negara tersebut dalam mengontrol pinjaman-pinjaman jangka pendek yang luar biasa besarnya.

SIMPULAN

Bagaimanapun, sebagai sebuah lembaga internasional yang mempunyai peran dan fungsi pengawasan, seharusnya IMF mempunyai mekanisme pencegahan terhadap krisis, bukan hanya *early warning system* berupa peringatan dini akan kemungkinan terjadi krisis moneter.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai suatu rezim moneter internasional, seharusnya IMF dapat memprediksi maupun mengingatkan negara-negara yang rapuh fondasi perekonomiannya karena pembangunan yang dilakukan atas dasar utang untuk bertindak tegas mengawasi utang swasta.

Bagaimanapun, tanda-tanda perekonomian dunia khususnya Asia, yang memburuk karena menganut sistem nilai tukar mengambang seharusnya dapat diantisipasi oleh IMF sehingga ada peringatan dini dan penanggulangan krisis yang cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Bogdanowitz-Bindert, Christine A. *Solving Global Debt Crisis*, (Ballinger Publishing Co, 1989)

Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations*, (New Jersey: Princeton University Press, 1987)

-----, *The Challenge of Global Capitalism*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000)

Horsnell dan Mabro. *Oil Market and Prices*, (Itacha: 1993)

K.S, Jomo (ed). *Tigers in Trouble Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia*, (Hongkong University Press, 1998)

Krasner, Stephen. *International Regimes*, (Itacha: Cornell University Press 1983) Neuwman, W. Lawrence. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (Allyn and Bacon)

Setiawan, Bonny. *Menggugat Globalisasi*, (Jakarta: INFID-IGJ, 2001)

Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 1997)

Skogly, Sigrun 1. *Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary System*, (London: Cavendish Publishing Ltd., 2001)

Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*, (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000)

Zang, Peter, *IMF and The Asian Financial Crisis*, (World Scientific, 1998)

Artikel dalam Buku

- Robert O Keohane, "The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economics Regimes." dalam Ole Holsti, et al (ed). *Change in the International System*, (Westview, 1988)
- Krasner, Stephen, "The accomplishment of international political economy," dalam Steve Smith, Ken Booth & Marsia Zalwzk. *International Theory: Positivism and Beyond*, (Cambridge University Press, 1996)
- Margareth G. Hermann, Charless F. Hermann dan Joe D. Hagan, "How Decision Units Shape Foreign Policy Behaviour," dalam Charless F. Hermann, Charles W. Kegley & James Rosenau (ed). *New Direction in Study of Foreign Policy*, (Boston: Allen & Unwin, 1987)
- Rotberg, Eugene, "The Politics of the Debt Crisis," in Chistine A. BogdanowiczBinderst. *Solving The Global Debt Crisis*, (New York: Harper & Row Publishers, 1989)
- Trichet, Jean-Claude. "Official Debt Reschedulling: The Paris Club" dalam Christine A. Bogdanowitz-Bindert. *Solving Global Debt Crisis*, (Ballinger Publishing Co, 1989)
- Vaubel, Roland, "The Political Economy of the International Monetary Fund: A Public Choice Analysis," dalam Roland Vaubel & Thomas D. Willet. *The Political Economy of International Organization a public choice approach*, (Westview Press, 1991)

Artikel dalam Jurnal

- Bello, Walden, "What is IMF'S Agenda for Asia," dalam *Focus on the Global South* (27 Januari 1998)
- Feldstein, Martin, "Refocusing the IMF," dalam *Foreign Affairs*, (Maret/April 1998) Fisher, Stanley, "In defense of the IMF, special tools for a special task," dalam *Foreign Affairs*, Volume 77, No. 4, (Juli/Agustus)
- Kapur, Davesh, "The IMF: A Cure or a Curse?," dalam *Foreign Policy*, (Summer 1998)
- Roche, David, "Let's hear it for the IMF," dalam *Time*, (Februari 1998)

Young, Oran R, "International Regimes: Toward a New Theory of Institutions," dalam *World Politics*, Vol. 7XKIX, No. 1, (Oktober 1996)

"A Talk with Michel Camdessus about God, Globalization and His Years Running the IMF," dalam *Foreign Policy*, (September-October 2000)

Dokumen Resmi

www.IMF.org

www.Depkeu.go.id/subsidi bbm

LoI RI -IMF 15 Januari 1998

Sambutan Menteri Keuangan Mewakili Pemerintah Berkenaan dengan Disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 5 Desember 2000

LAPORAN PEMERINTAH tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perkembangan Moneter dan Perkreditan, serta Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri Semester Pertama Tahun Anggaran 2000

Koran

Kompas

-----, "Empat Resiko Besar Jika RI-IMF Putus", 7 Juni 2002

-----, "Tekanan IMF terhadap Indonesia terlalu berlebihan", 14 April 2001

-----, "Ingin ekonomi pulih, jaga konsistensi", 14 Agustus 2000

-----, "Jebakan Utang Luar Negeri RI", 12 Oktober 2000

-----, "IMF, APBN & Pemulihan Ekonomi Indonesia", 12 Oktober 1999

-----, "Presiden Habibie mengakui pertemuan IMF - Pimpinan Parpol positif", 25 Juni 1999

-----, "Kedaulatan Moneter di tangan IMF", 21 Juni 1999

-----, "IMF juga tanya soal koalisi", 20 Juni 1999

----- , "Kesalahan IMF Perburuk Ekonomi Indonesia", 28 Januari 1999

----- , "Analisis Ekonomi Krisis Moneter di Indonesia & Pemulihan Ekonomi", 27 Januari 1999

Suara Pembaruan

----- , "Ekonom Indonesia Konservatif", 18 Juni 2001

Makalah

Stanley Fisher "The IMF and the Asian Crisis" yang disampaikan pada *Forum Funds Lecture* di University of California at Los Angeles (UCLA), 20 Maret 1998

Lain-lain

Konferensi Pers Bersama oleh Carol Welch (Friend of Earth), Nurina Widagdo (Banking Information Centre - BIC), Ivan Hadar (Indonesian Institute for Democracy Education - IDE) dan Binny Buchori (INFID), Jum'at, 11 Mei 2000

Jumpa Pers bersama DPR-IMF, 14 Desember 1999